**PENGARUH PENGARUH PERLUASAN NATO KE EROPA TIMUR TERHADAP KONFLIK UKRAINA**

**(ANALISIS KEBIJAKAN PERTAHANAN RUSIA)**

BAB I

PENDAHULUAN

1. **Latar Belakang**

Keamanan telah menjadi salah satu kajian yang sangat menarik dalam studi hubungan internasional. Meskipun kemudian berbagai kajian bermunculan dalam studi hubungan internasional namun kajian-kajian mengenai isu keamanan tetap mendapatkan tempat khusus bagi para penstudi hubungan internasional. Kondisi ini merujuk pada dinamika yang terjadi dalam perkembangan yang sangat pesat pasca berakhirnya perang dingin. Pesatnya perkembangan tersebut tidak dipungkiri karena terjadi perluasan dari cakupan maupun makna dari keamanan yang berkembang seiring dengan semakin menguatnya globalisasi yang memunculkan konsepsi serta aktor-aktor baru dalam isu keamanan tersebut.[[1]](#footnote-2)

Isu mengenai keamanan menjadi salah satu fokus dalam studi hubungan internasional disebabkan dunia yang mengalami berbagai macam konflik kepentingan. Keamanan merupakan suatu usaha dalam menjaga eksistensi suatu negara dan menjadi daya tawar suatu negara di kancah perpolitikan global. Semakin tinggi daya tawar yang diberikan suatu negara maka akan semakin tinggi pula kesempatan suatu negara untuk mencapai kepentingan nasionalnya, oleh sebab itu maka tak heran negara-negara yang ada saat ini berusaha untuk terus meningkatkan kemampuan militernya, dan negara adidaya (*superpower*) menempati posisi kuat untuk mempengaruhi dan menggunakan pengaruhnya demi mencapai kepentingan nasionalnya.[[2]](#footnote-3)

Berakhirnya rivalitas ideologi yang terjadi antara Amerika Serikat (AS) dan Uni Soviet (USSR) yang ditandai secara simbolis dengan runtuhnya tembok Berlin dan unifikasi dari dua Jerman serta pecahnya Uni Soviet menjadi negara-negara yang lebih kecil membawa sebuah angin segar bagi pendukung liberalisme yang optimis akan terciptanya perdamaian di dunia. Hal ini terkait dengan berakhirnya ketegangan yang terjadi kurang lebih 45 tahun (1945-1990) yang sama sekali tidak menggunakan kekerasan sebab berakhir dengan salah satu pihak hancur tidak dengan kekuatan bersenjata dari pihak lain[[3]](#footnote-4).

Berakhirnya persaingan kedua negara superpower pasca perang dingin antara AS dan USSR dan perubahan dunia ke dalam sebuah tatanan internasional yang bersifat multipolar mempunyai implikasi signifikan bagi keamanan regional. Hal ini merupakan suatu usaha yang tidak dapat ditebak sama sekali tetapi dalam waktu bersamaan memunculkan harapan untuk terciptanya perdamaian dan stabilitas yang ingin dicapai melalui konsep dan pendekatan baru mengenai keamanan, yang paling penting adalah ini menjadi sebuah multilateralisme dan kerjasama keamanan[[4]](#footnote-5).

Pasca perang dunia dunia II Uni Soviet mengubah strategi pendudukannya di Eropa Timur, dari militer ke dominasi politik dan ekonomi meskipun tentara Soviet tetap ditempatkan di negara-negara tersebut hingga keruntuhannya kelak. Strateginya adalah menunjuk rezim pro-komunis setempat untuk memerintah negara-negara tersebut di bawah pengawasan Moskow. Selain itu, Soviet juga berusaha mengembangkan pengaruhnya ke luar negeri, terutama ke beberapa negara tetangganya seperti Finlandia hingga ke timur tengah di Afghanistan. Hal ini memicu reaksi negatif dari negara-negara Barat yang berakibat dimulainya Perang Dingin.

Kedua negara *superpower* tersebut pun menggalang dukungan dari negara-negara lain. Uni Soviet membentuk Blok Timur dengan negara-negara komunis lainnya, seperti Kuba dan Tiongkok. Sedangkan Amerika Serikat di sisi lain membentuk Blok Barat, yang mayoritas beranggotakan negara-negara yang berasal dari Eropa Barat. Ketegangan antara dua kutub secara berhadap-berhadapan seperti inilah yang menyulut ‘panasnya’ Perang Dingin.

Joseph Stalin mendesak rakyat Soviet untuk tidak terperdaya dengan berakhirnya perang yang berarti negara bisa santai. Sebaliknya, perlu mengintensifkan usaha memperkuat dan mempertahankan tanah air. Tidak lama setelah munculnya tulisan George F. Kennan, diplomat di kedutaan besar Amerika Serikat untuk Uni Soviet, yang memaparkan tentang kefanatikan Stalin. Kemudian, presiden Harry S. Truman mendeklarasikan apa yang kemudian disebut Doktrin Truman. Doktrin ini menggarisbawahi strategi pembendungan politik luar negeri AS sebagai cara untuk menghambat ambisi ekspansionis Uni Soviet. Amerika Serikat juga merekrut sekutu-sekutunya untuk mewujudkan tujuan itu.[[5]](#footnote-6)

Pada esensinya, Doktrin Truman didasarkan atas prinsip moral bagi pembentukan nasib sendiri (*self determination*) bangsa-bangsa di dunia menurut perspektif luar negeri Amerika Serikat. Oleh karena itu, AS memprotes pendudukan Polandia, Rumania, dan Bulgaria yang berada di bawah rezim totaliter yang tidak memperhatikan kepentingan bangsanya untuk menentukan nasibnya sendiri. Berdasarkan doktrin tersebut, AS merasa memiliki tanggung jawab untuk membantu negara-negara yang masih berada di bawah rezim totaliter untuk menjadi negara yang lebih demokratis. AS berkepentingan untuk membantu negara-negara tersebut untuk membangun institusi yang demokratis demi kepentingan perdamaian internasional. Dilihat dari kerangka Perang Dingin, Doktrin Truman sebenarnya lebih ditujukan kepada Uni Soviet yang mulai menanamkan pengaruhnya di negara-negara Eropa Timur.[[6]](#footnote-7)

AS mengupayakan politik blokade terhadap pengaruh komunis Uni Soviet. Partai moderat dan konservatif lainnya di Eropa, serta demokratik-sosial, mulai memberikan dukungan penuh tanpa syarat kepada Sekutu Barat. Sedangkan Komunis Amerika dan Eropa, dengan dibiayai oleh KGB (Komitet Gosudarstvennoy Bezopasnosti), terlibat dalam operasi intelijen.[[7]](#footnote-8) Operasi ini tetap sesuai dengan aturan Moskow, meskipun perbedaan pendapat di kalangan komunis ini mulai muncul setelah tahun 1956. Kritik lain terkait Doktrin Truman ini berasal dari aktivis anti-Perang Vietnam, CND (Campaign for Nuclear Disarmament) dan gerakan pembekuan nuklir.

Kemudian, presiden Truman mulai mengucurkan proram bantuan melalui Marshall Plan ke negara-negra Eropa. Melalui program ini, Amerika Serikat memberikan bantuan ekonomi kepada negara-negara di Eropa Barat. Stalin menolak program bantuan tersebut bagi semua negara yang berada di wilayah Eropa Timur, ia mengatakan Amerika Serikat telah terlalu jauh ikut campur dalam urusan Eropa.

Di mata Uni Soviet, Marshall Plan merupakan rencana AS untuk memanfaatkan situasi Jerman demi kepentingan politiknya dengan cara mengeksploitasi sumber daya ekonomi Jerman. Menghadapi tuduhan tersebut, AS mengajak Uni Soviet untuk membicarakannya dalam pertemuan London akhir 1947. Dalam pertemuan tersebut delegasi AS mengatakan bahwa pembentukan pemerintahan Jerman merupakan hal yang sangat penting untuk membangun kembali Eropa pasca perang. Lebih dari dua tahun lalu, delegasi Amerika Serikat di Stuttgart menyatakan bahwa Amerika Serikat setuju untuk mendirikan pemerintahan sementara di Jerman. Tidak adanya persetujuan dari Uni Soviet tersebut ternyata merupakan penyebab berlarutnya krisis Jerman, bahwa Uni Soviet telah menuduh barat memiliki niat yang tidak baik atas kepentingan Uni Soviet. Kongres AS telah menyetujui agar dibentuknya sistem keuangan tunggal untuk Jerman Barat.[[8]](#footnote-9)

Selanjutnya *Treaty of Brussels* yang ditandatangani pada tanggal 17 Maret 1948 oleh Belgia, Belanda, Luksemburg, Prancis dan Inggris dianggap sebagai pelopor dari terbentuknya NATO.[[9]](#footnote-10) Blokade Berlin yang dilakukan Uni Soviet melatarbelakangi pembentukan aliansi militer regional tersebut, namun keterlibatan AS dianggap perlu baik untuk menghadapi kekuatan militer Uni Soviet maupun untuk mencegah militerisme nasionalis, sehingga pembicaraan untuk membentuk aliansi militer baru yaitu *North Atlantic Treaty Orgnization* atau Pakta Pertahanan Atlantik Utara ditandangani di Washington DC pada 4 April 1949 atas inisiatif AS. Kelima negara yang menandatangani *Treaty of Brussels* ditambah AS, Kanada, Portugal, Italia, Norwegia, Denmark, dan Islandia kemudian menjadi negara-negara pertama anggota NATO.

NATO mengadopsi doktrin *Massive Retaliation* atau pembalasan besar-besaran, artinya setiap anggota sepakat apabila salah satu dari anggota di Eropa maupun Amerika mendapat serangan, maka akan dianggap sebagai sebuah serangan terhadap seluruh anggota NATO. Jika serangan terjadi, maka perlu mengambil tindakan kolektif untuk membantu negara yang diserang. Dengan manfaat dan keuntungan yang ditawarkan oleh payung keamanan NATO, stabilitas keamanan di Eropa Barat lambat laun pulih, kemudian disusul dengan bertambahnya anggota yang bergabung dengan aliansi, Yunani dan Turki bergabung pada tahun 1952 dan Jerman Barat pada tahun 1955.[[10]](#footnote-11)

Di sisi lain, Uni Soviet merespon dengan membentuk pakta pertahanan tandingan yaitu Pakta Warsawa (*Warsaw Pact*) dengan negara-negara satelitnya di Eropa Timur, seperti Bulgaria, Albania, Cekoslovakia, Hungaria, Jerman Timur, dan Polandia yang didirikan pada 14 Mei 1955 di Praha. Uni Soviet juga memiliki kekuatan untuk mengintervensi secara militer jika salah satu negaranya berusaha untuk mendeklarasikan kemerdekaan. Meski Uni Soviet meningkatkan dominasinya di Eropa Timur melalui Pakta Warsawa, aliansi nominal ini jelas-jelas dipegang sebagai koersi. Soviet semakin khawatir ketika Barat secara aktif mendorong Jerman Barat untuk memiliki persenjataan kembali, untuk membantu mengimbangi kekuatan Uni Soviet.[[11]](#footnote-12) Dan setelah itu, kedua Blok Pertahanan ini terus mencoba menyebarluaskan pengaruh mereka untuk meningkatkan kekuatan militer mereka.

 Eropa Timur secara geografis adalah [wilayah](https://id.wikipedia.org/wiki/Wilayah) di bagian timur benua [Eropa](https://id.wikipedia.org/wiki/Eropa). Pada umumnya kawasan ini terletak di antara pegunungan [Ural](https://id.wikipedia.org/wiki/Pegunungan_Ural) dan [Kaukasus](https://id.wikipedia.org/wiki/Kaukasus) serta perbatasan [Rusia](https://id.wikipedia.org/wiki/Rusia) barat, atau secara alternatif juga mencakup negara-negara yang berdekatan dengan perbatasan Rusia Barat. Seperti halnya dengan benua, sebuah wilayah hanyalah konstruksi sosial sehingga jangan disamakan dengan aspek fisikal yang berdasarkan kriteria abstrak dan netral. Frase ini digunakan di [negara-negara Barat](https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Negara-negara_Barat&action=edit&redlink=1) untuk mengelompokkan seluruh negara Eropa yang tadinya merupakan [rezim komunis](https://id.wikipedia.org/wiki/Negara_komunis) yang dijuluki [Blok Timur](https://id.wikipedia.org/wiki/Blok_Timur). Konsep Eropa Timur diperkuat dengan dominasi ideologi [Komunisme](https://id.wikipedia.org/wiki/Komunisme) dan terutama [Uni Soviet](https://id.wikipedia.org/wiki/Uni_Soviet) setelah [Perang Dunia II](https://id.wikipedia.org/wiki/Perang_Dunia_II). Ide sebuah "[Tirai Besi](https://id.wikipedia.org/wiki/Tirai_Besi)" yang memisahkan Eropa Barat dan Timur merupakan pandangan umum selama [Perang Dingin](https://id.wikipedia.org/wiki/Perang_Dingin) berlangsung. Pandangan ketat ini memunculkan berbagai masalah karena ia gagal untuk mencakupi kompleksnya wilayah ini. Contohnya, negara komunis seperti [Yugoslavia](https://id.wikipedia.org/wiki/Yugoslavia) dan [Albania](https://id.wikipedia.org/wiki/Albania) menolak dikuasai oleh Moskow, tetapi pengecualian ini diacuhkan oleh banyak kalangan barat.[[12]](#footnote-13)

Uni Soviet merupakan sebuah negara kesatuan dari beberapa suku bangsa yang ada di Eropa Timur, serta negara yang paling dominan dari segi pengaruh maupun luas wilayah. Seiring berlarutnya Perang Dingin yang telah berlangsung selama 45 tahun, Uni Soviet mengalami kemunduran dari waktu ke waktu dan puncaknya pada tahun 1991 ketika presiden Uni Soviet yang terakhir, Mikhail Gorbachev mengundurkan diri. Uni Soviet runtuh, semangat kemerdekaan pun semakin kencang berhembus pada negara-negara yang selama ini berada di bawah pengaruh komunisme. Arus demokratisasi semakin mengemuka di kawasan Eropa Timur, seperti di Polandia, Romania, Hungaria, Cekoslovakia dan sebagainya, sementara Uni Soviet pecah menjadi beberapa negara independen, diantaranya Rusia, Ukraina, Georgia, Belarusia, Estonia, Latvia, Armenia, Moldova, Lithuania, Kazakhstan, Uzbekistan, Turkmenistan, Kirgyztan, Tajikistan, dan Azerbaijan.

Federasi Rusia adalah negara yang mewarisi 2/3 dari wilayah Uni Soviet, 50% penduduk, dan aset ekonomi serta persenjataan. Setidaknya ada empat warisan yang ditinggalkan Uni Soviet kepada Rusia, yaitu persepsi sebagai *Great Power,* geopolitik, pandangan bahwa sistem internasional merupakan sistem yang tidak dapat dijalankan dengan sistem unipolar, dan upaya untuk menghindari perang terbuka.[[13]](#footnote-14)

Pada tahun 2000, Vladimir Putin yang diusung oleh Partai Rusia Bersatu, memenangkan pemilihan presiden Rusia. Putin menjadi harapan baru untuk mengembalikan kejayaan Rusia seperti masa lalu. Kebangkitan militer Rusia terlihat di masa kepemimpinan Vladimir Putin, Putin memprioritaskan pada sektor militer. Dalam kurun waktu satu dekade terakhir, hingga dewasa ini, Rusia mulai menempuh kebijakan strategis, guna memulihkan kondisi dalam negeri. Rusia masih tetap berusaha untuk mengembalikan pengaruhnya pasca Perang Dunia II, terutama dalam peningkatan kekuatan militernya, yang merupakan sektor vital negara. Rusia juga masih memiliki persenjataan Nuklir, “warisan” Uni Soviet, yang hingga sekarang masih dikembangkan. Rusia memiliki keinginan untuk menjadi kekuatan baru di negara-negara pecahan Uni Soviet. Keinginan ini disertai dengan memberikan pengaruh, serta merangkul negara-negara di kawasan Eropa Timur, yang dianggap sebagai *backyard* Rusia.

Upaya Rusia merebut kembali hegemoni di kawasan Eropa Timur ini, terkendala dengan adanya campur tangan pihak NATO yang di dominasi oleh Amerika Serikat, dalam memengaruhi negara-negara tersebut. Dalam hal ini, upaya nyata telah dilakukan oleh pihak Amerika Serikat dan sekutunya, yang berusaha memperebutkan *hegemoni* dan pengaruh di Eropa, Asia dan seluruh dunia. Penerimaan Kapitalisme oleh negara-negara Komunis pada tahun 1980-an menggerogoti ikatan ideologis yang sebelumnya menyatukan negara-negara Blok Timur dalam visi bersama, menghadapi masalah-masalah keamanan. Di kalangan aliansi Barat sebaliknya terdapat perbedaan tentang doktrin strategis, kontrol persenjataan, pangkalan-pangkalan AS di wilayah negara-negara sekutunya dan khususnya *“out-of-area conflicts”* (konflik di luar batas-batas geografis tradisional NATO). Karena tak ada lagi ketakutan akan suatu perang dunia baru dan Perang Dingin telah berakhir, maka sejumlah kalangan mempertanyakan apakah persekutuan pertahanan masih diperlukan. Banyak kritikus menilai bahwa “NATO dan Pakta Warsawa hanya memperlama Perang Dingin sehingga keberadaan keduanya tidak lagi diperlukan.”[[14]](#footnote-15) Namun berakhirnya Perang Dingin tidak menyurutkan hasrat untuk menambah keanggotaan NATO, dengan masuknya Polandia, Republik Czeko dan Hungaria pada 1999. Dengan perluasan NATO ini maka perbatasannya jauh bergeser ke timur, langsung bersebelahan dengan Rusia. Masuknya Lithuania dalam NATO memberikan rasa aman baginya sesudah pemisahannya dari Uni Soviet pada 1991.[[15]](#footnote-16)

Kecurigaan Rusia terhadap perluasan NATO tidak mudah dihapuskan karena faktor sejarah. Beberapa kali Rusia diinvasi dari Barat, baik zaman Napoleon maupun Hitler. Tindakan militer NATO terhadap Serbia, terkait dengan masalah Kosovo, memperkuat kecurigaan Rusia bahwa bisa saja NATO melakukan hal yang sama terhadap Rusia. Namun harus diingat bahwa Rusia bukan Yugoslavia karena Rusia merupakan negara dengan jumlah senjata nuklir terbesar. Perluasan NATO ke Eropa Timur, termasuk ke negara-negara bekas Uni Soviet, dapat dipandang Rusia sebagai intrusi terhadap halaman belakangnya karena mengancam posisi geopolitik Rusia.

Upaya perluasan NATO tidak berhenti sampai di situ, keinginan Ukraina untuk mengikuti jejak negara-negara Eropa Timur lain untuk bergabung dengan aliansi kemanan Atlantik, melalui pemungutan suara di parlemen, dapat memicu kemarahan Rusia. Para pembuat undang-undang di dewan yang dikendalikan pemerintahan baru menyetujui suatu rancangan undang-undang yang menggugurkan status non-blok Ukraina. Pemerintahan baru Ukraina di bawah kepemimpinan presiden Petro Poroshenko telah bertekad menempatkan Ukraina di bawah perlindungan militer Barat setelah menang dalam pemilihan yang diserukan di tengah-tengah penggulingan presiden Viktor Yanukovych yang mendapat dukungan Moskow di Kiev pada Februari 2014.[[16]](#footnote-17)

Jatuhnya Viktor Yanukovych dari kursi kepresidenan Ukraina sebagai akibat dari krisis politik yang terjadi sejak akhir tahun 2013 di negara tersebut, telah berkembang menjadi krisis bilateral Ukraina-Rusia, dan bukan tidak mungkin akan berkembang lebih jauh lagi dengan melibatkan aktor-aktor global lainnya, termasuk Uni Eropa dan NATO. Ketegangan Rusia dengan negara-negara Barat mengenai Ukraina sejatinya bukan meruapakan hal baru. Dua belas tahun yang lalu, pada penghujung trahun 2004, ketegangan serupa juga nyaris muncul bersamaan dengan terjadinya “Revolusi Oranye” yang membawa kelompok pro-Barat pimpinan Viktor Yuschenko dan Yulia Tymoshenko mengungguli kelompok pro-Rusia pimpinan Yanukovich. Segera setelah Yuschenko menjabat sebagai presiden Ukraina, semangat untuk membawa Ukraina bergabung dengan Uni Eropa dan NATO dikumandangkan. Namun setelah dua belas tahun berlalu, cita-cita “Revolusi Oranye” belum juga dapat dipenuhi. Konflik internal yang terjadi di dalam tubuh kelompok pro-Barat membawa Yanukovych dan kelompok pro-Rusia kembali ke panggung politik Ukraina, hanya dua tahun setelah terjadinya “Revolusi Oranye” dan otomatis kembali mengubah haluan kebijakan luar negeri Ukraina.[[17]](#footnote-18)

Selain disebabkan perpecahan pada level internal, belum berhasilnya Ukraina untuk bergabung dengan Uni Eropa dan NATO juga disebabkan oleh kuatnya resistensi Rusia. Ukraina dan negara-negara Eropa Timur lainnya merupakan halaman depan Rusia yang sangat berpengaruh terhadap posisi geopolitik Rusia. Sebagaimana disebutkan di dalam Konsepsi Kebijakan Luar Negeri Federasi Rusia tahun 2013, upaya untuk membangun kemitraan dengan negara-negara pecahan Uni Soviet yang tergabung di dalam Commonwealth of Independent States (CIS) tersebut menyebutkan, dalam wilayah ekonomi maupun politik dan keamanan merupakan salah satu prioritas utama kebijakan luar negeri Rusia. Secara khusus, dokumen tersebut menyebutkan keinginan Rusia untuk melibatkan Ukraina dalam proses integrasi ekonomi Eurasia seiring dengan gagasan besar Rusia untuk membentuk Eurasian Economic Union. Dalam wilayah politik dan keamanan, ukraina dan negara-negara pecahan Uni Soviet merupakan salah satu poros utama kebijakan luar negeri dan keamanan Rusia. Sudah sejak lama Rusia menentang keras upaya Ukraina untuk bergabung dengan Uni Eropa dan NATO.

Bagi Rusia, keberadaan kekuatan militer NATO dan Uni Eropa di negara yang berbatasan langsung dengannya merupakan sebuah ancaman langsung bagi keamanan nasional Rusia. Tidak jarang penolakan ini disampaikan secara keras, seperti ancaman Rusia pada Februari 2008 untuk mengarahkan rudalnya ke Ukraina jika negara itu memaksa bergabung dengan NATO dan menyetujui permintaan Amerika Serikat saat itu untuk menempatkan perisai rudalnya di kawasan Eropa.

Terkait dengan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji fenomena tersebut dengan mengangkatnya pada skripsi yang berjudul :

**“PENGARUH PERLUASAN NATO KE EROPA TIMUR TERHADAP KONFLIK UKRAINA (ANALISIS KEBIJAKAN PERTAHANAN RUSIA)”**

1. **Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, diajukan identifikasi masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana esensi perimbangan kekuatan antara Rusia dan NATO?
2. Bagaimana korelasi antara perluasan NATO dengan konflik Uraina?
3. Bagaimana respon Rusia terhadap NATO?
4. **Pembatasan Masalah**

Perimbangan kekuatan yang terjadi antara Rusia dan NATO ini membuat Rusia lebih fokus dalam membuat kebijakan pertahanan untuk mengantisipasi ancaman keamanan dari luar. Dikarenakan isu mengenai perluasan NATO ini sangat penting bagi Rusia, maka penulis akan membatasi pada masalah perluasan NATO ke Eropa Timur, yaitu yang mencapai puncaknya di Ukraina dan analisis kebijakan pertahanan Rusia.

1. **Rumusan Masalah**

Berdasarkan pembatasan masalah, maka penulis merumuskan masalah penelitian sebagai berikut :

“Bagaimana korelasi perluasan NATO dengan konflik Ukraina dan respon Rusia terhadap NATO?”

1. **Tujuan penelitian dan Kegunaan Penelitian**
2. **Tujuan Penelitian**

Selain tujuan-tujuan yang telah disebutkan sebelumnya, penelitian ini pun memiliki kegunaan. Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui esensi perimbangan kekuatan Rusia-NATO
2. Mengetahui korelasi antara perluasan NATO ke Eropa Timur dan konflik Ukraina
3. Mengetahui respon NATO terhadap kebijakan pertahanan Rusia
4. **Kegunaan Penelitian**

Adapun tulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua elemen dan orang-orang yang memiliki kepentingan ataupun yang berminat pada permasalahan yang ditulis oleh penulis sehingga tulisan ini dapat dijadikan sebagai salah satu bahan referensi. Secara khususnya tulisan ini diharapkan

bermanfaat sebagai berikut:

1. Untuk menambah wawasan pengetahuan tentang berbagai aspek yang saling berkaitan dalam bidang konflik internasional, dan khususnya mengenai aspek benturan antara negara *Super Power* yang terpicu oleh konflik di Eropa Timur.
2. Dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada disiplin ilmu Hubungan Internasional khususnya mengenai peran serta akot *state* dalam merespon konflik global.
3. Untuk menambah pengalaman dan pengetahuan dan melaksanakan penelitian yang berpedoman pada metode dan teknik yang bersifat ilmiah. Sekaligus mengimplementasikan pengetahuan yang diperoleh penulis selama belajar di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Hubungan Internasional Universitas Pasundan.
4. **Kerangka Pemikiran dan Hipotesis**
5. **Kerangka Pemikiran**

Sebagai pedoman untuk mempermudah penulisan dalam melakukan penelitian, penulis mengemukakan teori-teori dan konsep-konsep dari para ahli Hubungan Internasional. Kerangka berfikir ini bertujuan untuk membantu memahami dan menganalisa permasalahan dengan ditopang oleh pendapat para pakar yang berkompeten dalam penelitian ini. Oleh karena itu penulis akan menggunakan teori-teori yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti sebagai sarana dalam membentuk pengertian dan menjadikan pedoman dalam objek penelitian.

Kredibilitas dari hasil suatu penelitian dapat dilihat dari sejauh mana kemampuan perangkat-perangkat ilmiah terhadap objek penelitian, seperti penggunaan pendekatan ilmiah, penetapan anggapan dasar, serta kerangka konseptual yang digunakan untuk mengarahkan penelitian yang dimaksud.

Untuk lebih memahami dan mempermudah proses penelitian, penulis menggunakan beberapa pendekatan teoritis serta pendapat para ahli yang mempunyai hubungan dengan penelitian. Teori-teori dan pendapat tersebut akan digunakan sebagai landasan berpijak bagi peneliti dalam mengemukakan kerangka pemikiran, dan diharapkan tidak jauh dari sifat-sifat ilmiah serta dapat dipertanggungjawabkan.

Penulis mencoba untuk mengutip teori atau pendekatan para ahli yang ada hubungannya dengan objek yang diteliti dan disimpulkan pada kerangka pemikiran yang mana tindakan ini dimaksudkan untuk memberi pondasi teoritis yang pada akhirnya akan dapat membantu dalam memformulasikan hipotesis, dimana hal ini dianggap penting karena teori-teori tersebut digunakan untuk dapat memahami fenomena-fenmena dalam hubungan internasional, sehingga penulis mengambil beberapa pendapat yang disajikan panduan dan acuan menyususn skripsi ini.[[18]](#footnote-19)

Kerangka pemikiran ini merupakan argumentasi yang menjelaskan hubungan yang terdapat antar berbagai faktor yang saling berkaitan dan membentuk konstelasi permasalahannya, juga merupakan kajian teoritis berdasarkan pengujian secara empiris terhadap kesimpulan analisis teoritis.

Dinamika hubungan internasional dewasa ini menunjukan perkembangan ini sedang mengalami pertumbuhan yang signifikan, dimana proses perkembangannya mengalami sirkulasi yang terus menerus berjalan secara dinamis sesuai dinamika internasional. Dengan luasnya kajian studi hubungan internasional dan mencakup segala hal yang berkaitan dengan dunia internasional walaupun sangat umum sehingga studi hubungan Internasional merupakan ilmu yang interdisipliner dan multidisipliner dalam artian ilmu hubungan internasional dalam perkembangannya masih memerlukan dukungan dari ilmu-ilmu yang lain.

Pembahasan pada point ini akan diawali dengan memberikan definisi Hubungan Internasional itu sendiri, dengan mengutip dari pemikiran **K. J. Holsti** yang menyatakan bahwa:

**hubungan internasional adalah kegiatan-kegiatan atau semua bentuk interaksi antar anggota suatu masyarakat dengan anggota masyarakat lainnya,apakah interaksi itu disponsori atau tidak oleh pemerintahnya. Yang dimaksud masyarakat dalam hal ini adalah suatu Negara yang mempunyai batas-batas wilayah dan pemerintahannya serta kedaulatan di masing-masing wilayahnya merupakan suatu usaha untuk mencapai tujuan nasional setiap bangsa atau negara yang melalui interaksi dengan Negara lain dimana interaksi tersebut dapat berbentuk hubungan antar pemerintahan maupun antar Negara. Hubungan diplomatik , persekutuan, aliansi, peperangan, negoisasi, ancaman kekuatan militer, budaya, ekonomi, ikatan ras dan etnik, dan hubungan antar manusia yang tinggal di Negara yang berbeda[[19]](#footnote-20)**

Hubungan internasional merupakan studi tentang *‘cross-border transaction*’secara umumnya, dan melihat batas-batas Negara menjadi hal yang penting dalam aktivitasnya karena dianggap sebagai suatu batas-batas politik suatu Negara. Harus diakui bahwa sebagian besar realitas hubungan internasional menempatkan Negara-bangsa (nation-state) sebagai aktor yang paling rasional dan efektif. Karena perilaku internasional sangat berkaitan erat dengan perilaku Negara sehingga aktor Negara menjadi fokus utama para sarjana dalam menganalisa aktivitas dan fenomena hubungan internasional.

Berdasarkan pernyataan bahwa negara merupakan subjek utama dalam hubungan internasional, maka perlu diketahui definisi dari Negara. Menurut **Abdul Gaffar Pringgodigdo** memberi paparan bahwa:

**Negara adalah organisasi kekuasaan atau organisasi kewibawaan yang memenuhi persyaratan tertentu, yaitu harus ada: Pemerintah yang berdaulat, wilayah tertentu dan rakyat yang hidup teratur sehingga membentuk suatu bangsa.[[20]](#footnote-21)**

Terkait dengan ini **Jon Herz** juga, mendefinisikan bahwa hubungan internasional memiliki arti dan peran yang berbeda, seperti berikut:

**hubungan internasional adalah sebuah paham keilmuan yang mengidentifikasikan hubungan internasional sebagai konsep yang membahas tentang kebijakan luar negeri yang lebih mementingkan keamanan yang menjadi pusat perhatian semua rakyatnya[[21]](#footnote-22)**

Secara jelas, pengertian tersebut mengartikan hubungan internasional sebagai studi tentang interaksi antara jenis-jenis kesatuan-kesatuan sosial tertentu, termasuk studi tentang keadaan relevan yang mengelilingi interaksi. Serta berbagai respon perilaku yang muncul diantara dan antar masyarakat yang terorganisir secara terpisah termasuk komponen-komponennya. Interaksi yang dilakukan tersebut tentu akan sangat berkaitan dengan politik, sosial, ekonomi, konflik, budaya dan interaksi lainnya diantara aktor-aktor negara dan aktor-aktor non-negara.

Eksistensi ataupun keberadaan Negara tak lepas dari esensi sebuah Kedaulatan atau yang lebih dikenal dengan Kedaulatan Negara. Prinsip sederhananya dapat diartikan jika ada sebuah negara maka negara tersebut pasti memiliki kedaulatan. **T. May Rudy** menegaskan:

**Kedaulatan negara diartikan bahwa negara tersebut telah memiliki kemerdekaan dan adanya kedaulatan terhadap warga-warga negaranya dalam urusan kenegaraan serta penjelasan dalam batas-batas wilayah teritorialnya. Pengertian kedaulaatan mengalami penyempitan makna yang pada awalnya kedaulatan haknya dimiliki oleh negara-negara merdeka yang ditandai dengan munculnya negara-negara nasionalis yang hanya mengenal kedaulatan dalam pembatasan-pembatasan terhadap ekonomi negara yang telah berkembang menuju tudak hanya pembatasan-pembatasan suatu negara dianggap sebagai sisa (residiuun) dari kekuasaan yang dimiliki oleh suatu negara dalam batas-batas yang ditetapkan oleh hukum internasional.**

Selain itu **T. May Rudy**, mengungkapkan suatu kedaulatan teritorial sebagai salah satu unsur esensial dari negara yakni penguasaan suatu daerah teritorial, dimana terdapat hukum yang berlaku atas wilayah teritorialnya sehingga wewenang tertinggi atas kekuasaan teritorialnya berada pada negara terebut. Kedaulatan teritorial berarti bahwa di kawasan terebut yuridiksi atau aturan hukum yang berlaku ditentukan oleh negara tersebut atas orang (warga negaranya) dan harta benda (sumber daya alam) yang terkandung di dalamnya.

Selanjutnya aktivitas dan interaksi yang terjadi dalam ruang lingkup Hubungan Internasional dikenal dengan istilah Politik Luar Negeri. Politik Luar Negeri adalah sebuah simbolisasi bahwa adanya aktivitas internasional yang terjadi dalam ruang lingkup Hubungan Internasional yang bersifat global. Para ahli seperti **Plano** dan **Olton** berpendapat bahwa:

**pengertian Politik Luar Negeri adalah gagasan yang menegaskan bahwa politik luar negeri adalah strategi atau rencana tindakan yang dibuat oleh para pembuat keputusan negara dalam menghadapi negara lain atau unit politik internasional yang lainnya untuk mencapai tujuan nasional. Tujuan Politik Luar Negeri adalah untuk menggambarkan tentang masa depan suatu negara yang diawali dari penetapan kebijakan dan keputusan yang didasarkan kepada kepentingan nasional[[22]](#footnote-23)**

Kemudian dalam Politik Luar Negeri bertujuan untuk mencapai Kepentingan Nasional yang eksistensinya tidak akan terlepas dalam Hubungan Internasional. Definisi Kepentingan Nasional pertamakali diperkenalkan oleh **Hans Morgenthau** yang pendekatannya menggunakan konsep Realisme, sebagai berikut:

**Para penganut realis menyamakan kepentingan nasional sebagai upaya untuk mengejar *power*, dimana *power* adalah segala sesuatu yang dapat mengembangkan dan memelihara kontrol suatu negara terhadap negara lain. Hubungan kekuasaan atau pengendalian ini dapat melalui teknik pemaksaan atau kerjasama. Karena itu kekuasaan dan kepentingan nasional dianggap sebagai sarana dan sekaligus tujuan dari tindakan suatu negara untuk bertahan hidup (*survival*) dalam politik internasional[[23]](#footnote-24)**

Dalam perkembangan interaksi dunia Hubungan Internasional yang mengedepankan Kepentingan Nasional, kerapkali terjadi gesekan kepentingan yang lebih dikenal dengan istilah Konflik Internasional ataupun Krisis Internasional. Secara lebih dalam memahaminya dari sisi Historis pertikaian ataupun konflik yang terjadi antara negara seringkali muncul dalam dunia Internasional dan tak terhindarkan. Hal ini disebabkan oleh banyak faktor, namun pengertian dari Konflik Internasional telah dipaparkan oleh beberapa ahli seperti **Lewis A. Coser** dan **Ralf Dahdendorf** yang mendeskripsikan bahwa:

**Menurut teori konflik, masyarakat disatukan dengan “paksaan”. Maksudnya, keteraturan yang terjadi di masyarakat sebenarnya karena adanya paksaan (koersi). Oleh karena itu, teori konflik lekat hubungannya dengan dominasi, koersi dan power[[24]](#footnote-25)**

Alvin Toffler mengatakan bahwa kekuatan dan kemampuan negara di era reformasi berasal dari tiga hal, yaitu kemampuan mempengaruhi serta menekan negara lain (*power politics*) yang antara lain melalui penggunaan kekuatan angkatan bersenjata (militer), *wealth* (ekonomi), dan knowledge (ilmu pengetahuan dan teknologi). **Toffler** menambahkan bahwa elemen militer dan ekonomi merupakan faktor utama kekuatan suatu negara di dalam konstelasi politik internasional.[[25]](#footnote-26)

Kedua elemen tersebut menjadi hal yang sangat penting sebab tidak ada negara manapun yang dapat menjalankan aktifitas keamanan nasionalnya atau terlibat dalam konflik atau perang jika ekonomi nasionalnya tidak seimbang begitu pula sebaliknya. Sebab faktor ekonomi dapat menguatkan sekaligus membatasi aktifitas negara dalam pelaksanaan keamanan nasional dan pertahanan negara.[[26]](#footnote-27)

Dalam paradigma Realis, negara sebagai aktor haruslah memiliki dan meningkatkan kekuatan militernya. Hal ini dianggap sebagai komponen negara dalam menjaga stabilitas pertahanan dan kemananannya. Pertahanan negara menjadi hal yang sangat diperhatikan sebab kedaulatan merupakan hal yang mutlak. **Walter Lippmann** seorang ahli sarjana Hubungan Internasional, merangkum kecenderungan ini dengan pernyataannya yang terkenal:

**suatu bangsa berada dalam keadaan aman selama bangsa itu tidak dapat dipaksa untuk mengorbankan nilai-nilai yang dianggapnya penting (vital) ..., dan jika dapat menghindari perang atau jika terpaksa melakukannya, dapat keluar sebagai pemenang.[[27]](#footnote-28)**

Suatu Negara akan berlomba-lomba untuk memiliki *power* (kekuatan/kekuasaan) yang lebih besar dibandingkan negara lain. Konsep *power* ini dianggap sebagai unsur utama dalam pemikiran realism dan merupakan konsep yang telah ada sejak zaman Yunani kuno,[[28]](#footnote-29) bahkan mendefinisikan bahwa yang dimaksud dengan *power* sebagai perjuangan memperoleh kekuasaan dan merupakan tindakan politik. Jadi dapat dikatakan bahwa *power* adalah:

**bisa terdiri dari apa saja yang menciptakan dan mempertahankan pengendalian seseorang atas orang lain (dan itu) meliputi semua hubungan sosial yang mendukung tujuan (pengendalian) itu, mulai dari kekerasan fisik sampai ke hubungan psikologis yang paling halus yang dipakai oleh seseorang untuk mengendalikan pikiran orang lain[[29]](#footnote-30)**

Dari konsep power tersebut dapat di lihat bahwa kekuasaan dapat diciptakan melalui *hard power* ataupun melalui hubungan dapat diciptakan melalui hubungan psikologis. Strategi psikologis inilah yang diterapkan negara yang bersaing (Rusia-NATO) dalam memperebutkan hegemoni di Eropa Timur. Strategi perimbangan yang digambarkan tidak hanya berpusat pada pertahanan *(defense)* maupun penyerangan *(offense)* tetapi pada konsep deterens *(deterrence).[[30]](#footnote-31)*

Konsep *deterrence* ini merupakan upaya untuk mempengaruhi kondisi psikologis musuh dan bersifat mencegah terjadinya perang. Konsep ini dapat digunakan sebelum *defense* (pertahanan) di praktikkan. *Defense* digunakan jika perang telah terjadi sedangkan *deterrence* digunakan sebelum adanya *defense.* Dalam kasus ini, Rusia-NATO menerapkan strategi *deterrence* yaitu tiap pihak berusaha untuk memperkuat militer dan persenjataannya. Hal ini menunjukkan bahwa kedua belah pihak berusaha untuk menakuti pihak lawan dengan melakukan perlombaan senjata.

Dalam interaksi antarnegara terdapat hubungan dua respons. Pengaruh dapat langsung ditujukan pada sasaran tetapi juga merupakan akibat dari tindakan tertentu. Apapun alasannya, negara sebagai sasaran dari pengaruh langsung maupun tidak langsung, harus mengambil respon dalam bentuk kebijakan dalam hubungan dengan negara lain untuk memengaruhi atau memaksa pemerintah negara lain agar menerima keinginan politiknya. Kemudian dalam interaksi negara antarnegara, interaksi dilakukan didasarkan pada kepentingan nasional masing-masing negara. Untuk memperjuangkan tujuan dan kepentingan nasional, negara tidak dapat melepaskan diri dari kebijakannya baik politik dala negeri maupun luar negeri. Kepentingan nasional adalah tujuan utama bagi suatu negara salah satu kepentingan nasional adalah keamanan negara.[[31]](#footnote-32)

Formulasi dari pola aksi reaksi ini memberi kesan bahwa rangkaian aksi dan reaksi selalu tertutup dan berbentuk asimetris. Misalnya NATO mengeluarkan aksi yang dianggap Rusia sebagai bentuk ancaman, maka aksi tersebut akan dipersepsikan oleh para pembuat keputusan di negara Rusia dan selanjutnya berdasarkan hasil mempersepsikan tersebut, Rusia akan memberikan respon atau reaksi atas aksi dari pihak NATO tadi. Kemudian reaksi Rusia ini kembali direspon Pihak NATO berupa aksi susutan. Di dalam proses ini terdapat suatu hubungan timbal balik (respirokal).[[32]](#footnote-33) Menurut Anak Agung Banyu Prawita, mengatakan bahwa :

**Rangkaian pola hubungan aksi-reaksi ini meliputi proses sebagai berikut: (1) Rangsangan atau kebijakan aktual dari negara yang memprakarsai (2) Persepsi dari rangsangan tersebut oleh pembuat keputusan di negara penerima (3) Respon atau aksi balik dari negara penerima (4) Persepsi atau respon oleh pembuat keputusan dari negara pemrakarsa.[[33]](#footnote-34)**

Dalam konteks sistem internasional maka keamanan adalah kemampuan negara dan masyarakat untuk mempertahankan identitas kemerdekaan dan integritas fungsional mereka. Untuk mencapai keamanan, kadang-kadang negara dan masyarakat berada dalam kondisi harmoni atau sebaliknya. Dalam studi hubungan internasional dan politik internasional, keamanan merupakan konsep penting yang selalu dipergunakan dan dipandang sebagai ciri eksklusif yang konstan dari hubungan internasional.[[34]](#footnote-35)

Defini keamanan yang paling sering oleh penstudi Hubungan Internasional adalah definisi dari **Barry Buzan** yang dalam bukunya *Peoples, States, and Fear.* Menyatakan bahwa “Keamanan, dalam arti tujuan apapun, mengukur adanya ancaman terhadap nilai-nilai yang diperoleh, dalam arti subjektif, tidak adanya ketakutan bahwa nilai-nilai tersebut akan diserang”.[[35]](#footnote-36)

Maka dari definisi-definisi yang telah disebutkan oleh para penstudi HI tersebut dapat dilihat bahwa keamanan merupakan ketiadaan ancaman dari nilai-nilai yang dibutuhkan manusia dalam menjalani kehidupannya.

Sedangkan konsep ancaman terhadap keamanan sendiri didefinisikan **Richard Ullman** sebagai:

**Tindakan atau urutan peristiwa yang mengancam secara drastis dan selama rentang waktu yang relatif singkat waktu untuk menurunkan kualitas hidup penduduk suatu negara atau mengancam secara signifikan dan mempersempit berbagai pilihan kebijakan yang tersedia bagi pemerintah dari negara, atau, badan non-pemerintah swasta (orang, kelompok, perusahaan) dalam negara[[36]](#footnote-37)**

Sementara itu, menurut **Simon Dalby**, dimensi keamanan dalam studi Hubungan Internasional telah mengalami pergeseran dari perspektif tradisional yang terbatas pada perang dan damai menuju perspektif nontradisional yang lebih mengedepankan *human security* dan mengandung lebih banyak aspek. Keamanan tidak lagi terfokus pada *interstate relations*, tetapi juga pada keamanan untuk masyarakat.[[37]](#footnote-38)

**Peter Hough** mengatakan bahwa definisi mengenai keamanan masih bersifat *contested concept*, atau sebuah konsep yang masih akan terus berkembang.[[38]](#footnote-39) Namun **Viotti dan Kauppi** telah mendefinisikan keamanan sebagai pertahanan dan perlindungan dasar dari suatu negara, dan konsep keamanan ini berlaku untuk individu maupun kelompok.[[39]](#footnote-40) Sedangkan Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan keamanan sebagai suatu situasi yang terlindung dari bahaya (keamanan objektif), adanya perasaan aman (keamanan subjektif) dan bebas dari keragu-raguan.

Konsepsi keamanan nasional senantiasa memiliki hubungan erat dengan pengupayaan, pertahanan dan pengembangan kekuatan atau kekuasaan sepanjang kaitannya dengan analis hubungan internasional dan politik luar negeri, maka dalam pengaplikasiannya selalu menimbulkan perdebatan sehingga langkah ke arah konseptualisasinya tidak selalu berjalan seiring. *Power* atau kekuasaan itu sendiri secara simplistis merupakan kemampuan satu unit politik (negara) dalam mencegah konflik dan mengatasi rintangan-rintangan.[[40]](#footnote-41) Secara implisit hal ini menyimpulkan tentang terdapatnya faktor keamanan sebagai unsur yang menstimulasi pengupayaan pencapaian dari *power* itu sendiri. Menurut **Barry Buzan**:

**Konsep keamanan merupakan salah satu pendekatan dalam mengkaji hubungan internasional yang lebih baik, mendalam dan berguna dibanding dengan konsep kekuatan dan perdamaian. Konsep keamanan ini dapat dilihat sebagai pengaruh dari masing-masing posisi ekstrem antara kekuatan dan perdamaian.[[41]](#footnote-42) Analisis keamanan memerlukan suatu cara pandang yang menempatkan negara dan sistem ke dalam sebuah hubungan timbal balik yang saling menguntungkan dimana negara sebagian terbentuk dengan sendirinya dan sebagian lain dibentuk oleh lingkungan anarki yang kompetitif dan sengit. Lingkungan domestik dan dinamika internasional, keduanya merupakan hal yang paling penting bagi analisis keamanan karena merupakan hubungan yang kompleks di antara keduanya.[[42]](#footnote-43)**

Selanjutnya keamanan (*security*) di sini dapat kita bedakan dengan konsep pertahanan (*defense*) yang memiliki kesamaan dari segi tujuannya, yaitu kemerdekaan atas ancaman yang mengganggu kebebasan dalam melaksanakan kedua konsep di atas, dimana keamanan biasanya lebih bersifat preventif dan antisipatif dalam merespon ancaman dibandingkan pertahanan.

Dalam kasus perluasan NATO di Eropa Timur, masalah-masalah keamanan yang muncul salah satunya bisa berupa tindakan peningkatan kekuatan militer suatu negara dalam hal ini Rusia yang bertujuan untuk perimbangan kekuatan militer, dan pendekatan yang demikian apabila dilakukan secara terus menerus pada gilirannya dapat menimbulkan apa yang disebut dilema keamanan.[[43]](#footnote-44) Dilema keamanan ini dapat terjadi apabila peningkatan kapabilitas pertahanan dan keamanan dipersepsikan sebagai ancaman dan petunjuk sikap bermusuhan oleh pihak lain. Demikian suatu reaksi atas aksi yang dilakukan suatu pihak akan menimbulkan reaksi yang baru dari pihak lain.

Keamanan merupakan suatu fenomena yang berhubungan, oleh karenanya seseorang tidak bisa memahami keamanan nasional suatu negara tanpamemahami pola internasional yang melekat dalam kesalingtergantungan keamanan yang ada.[[44]](#footnote-45) **Barry Buzan** menyatakan:

**Penerapan strategi keamanan suatu negara selalu memperhitungkan aspek-aspek *threat* (ancaman) dan *vulnerability* (kerentanan) negara tersebut. Ancaman dan kerentanan adalah dua konsep yang berbeda namun mempunyai keterkaitan yang erat di dalam perwujudan keamanan nasional. Suatu ancaman terhadap keamanan nasional yang dapat dicegah akan mengurangi derajat kerentanan suatu negara pada keamanan nasionalnya. Kedua aspek dari keamanan nasional tersebut sangat ditentukan oleh kapabilitas yang dimiliki negara tersebut.[[45]](#footnote-46)**

1. **Hipotesis**

Inti kepentingan Rusia salah satunya terletak pada masalah keamanan nasionalnya. Rusia adalah sebuah negara besar dengan wilayah dan jumlah penduduk yang sangat besar, namun tidak memiliki perbatasan alam yang dapat mengamankannya dari serangan musuh yang datang dari luar. Kondisi ini membentuk mentalitas bangsa Rusia menjadi bangsa yang ekspansif. Selalu mengembangkan diri, menduduki daerah-daerah baru di sekelilingnya untuk dijadikan *buffer zone* bandingkan dengan Amerika Serikat yang negaranya “dilindungi‟ oleh alam berupa lautan luas dan negara-negara tetangga yang kemampuan militernya jauh di bawahnya.[[46]](#footnote-47)

Karena itu, perluasan keanggotaan NATO ke wilayah negara-negara satelit eks Uni Soviet seperti salah satunya Ukraina, sudah barang tentu akan dipersepsikan sebagai ancaman yang sangat potensial bagi kedaulatan territorial Rusia. Jadi, adalah suatu kewajiban Rusia untuk menjawab tantangan Amerika Serikat sebagai otak dari setiap keterlibatan NATO pada setiap konflik yang mungkin timbul di mandala Eropa, dengan senjata konvensional maupun nuklir. Berdasarkan pemaparan tersebut penulis mengambil hipotesis sebagai berikut: **“Jika Ukraina bergabung dengan NATO hal tersebut akan mengancam kedaulatan Rusia, maka Rusia merespon dengan membuat kebijakan pertahanan dan politik terhadap Ukraina”**

1. **Operasionalisasi Variabel dan Indikator**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Variabel Dalam Hipotesis (Teoritis)** | **Indikator (Empiris)** | **Verifikasi (Analisis)** |
| **Variabel Bebas:**Bergabungnya Ukraina dengan NATO akan mengancam kedaulatan Rusia. | 1. Presiden Vladimir Putin menandatangani strategi keamanan nasional baru Rusia yang secara tegas mengidentifikasi NATO sebagai ancaman.
2. NATO memperkuat kooperasi dengan Ukraina salah satunya dengan memperkuat militer Ukraina
 | 1. http://www.voaindonesia.com/content/dokumen-rusia-sebut-nato-sebagai-ancaman-/3133051.html
2. <http://www.wsj.com/articles/nato-expands-cooperation-with-ukraine-support-for-its-armed-forces-1442928955>
 |
| **Variabel Terikat:**maka sebagai respon atas upaya NATO tersebut, Rusia merespon dengan kebijakan pertahanan dan politik terhadap Ukraina | 1. Rusia mengeluarkan kebijakan pertahanan melalui doktrin militer terbarunya
2. Menurut Vladimir Putin, intervensi yang dilakukan Rusia atas Ukraina adalah intervensi kemanusiaan
 | 1. http://indonesia.rbth.com/technology/2015/01/19/rusia\_jawab\_tantangan\_geopolitik\_dalam\_doktrin\_militer\_terbarunya\_26609
2. <http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2014/03/140304_ukraina_putin>
 |

1. **Skema Kerangka Teoritis**

**Respon**

**NATO Enlargement**

**Rusia**

**Ukraina**

**Intervensi**

**Doktrin Militer**

**Uni Eropa**

**Kontra**

**Referendum Krimea**

**Amerika Serikat**

**Konflik**

1. **Tingkat Analisis**

Penggunaan tingkat analisis penting dilakukan untuk memudahkan memilah-milah masalah yang paling layak ditekankan atau dianalisis, serta untuk menghindari kemungkinan melakukan kesalaham metodologis yang disebut *fallacy of composition* dan *ecological falacy.[[47]](#footnote-48)*

Tingkat analisa yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu tingkat analisa **Negara-Bangsa** karena berdasarkan judul dari skripsi ini yaitu menyangkut masalah kedaulatan Negara Rusia dan Ukraina. Oleh karena itu, adapun hubungan tingkat analisa yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisa ***Korelasionis***. Analisa korelasioanis yaitu analisa yang unit eksplanasinya (variabel bebas/ independen/ mempengaruhi ) dan unit analisanya (variabel terikat/ dependen/ dipengaruhi ) pada tingkatan yang sama artinya kedua belah pihak memiliki perimbangan kekuatan yang sama kuat. Unit eksplanasi ( variabel bebas/ independen/ mempengaruhi ) dalam penelitian ini yaitu pengaruh upaya perluasan NATO di Eropa Timur melalui konflik Ukraina, sedangkan yang menjadi unit analisis (variabel terikat/ dependen/ dipengaruhi ) dalam penelitian ini yaitu kebijakan pertahanan Rusia sebagai negara *super power.*

1. **Metode Penelitian dan teknik pengumpulan data**
2. **Metode penelitian**

Metode penelitian adalah prosedur-prosedur atau cara pengkajian yang dilakukan dalam rangka pencarian kebenaran dalam masalah tertentu yang diteliti, serta meningkatkan pengetahuan ilmiah. Metode atau cara pengkajian untuk penulisan skripsi ini dilakukan secara deskriptif analitis yaitu :

**Merupakan metode yang berusaha mengumpulkan, menyusun, menginterpretasikan data yang kemudian diajukan dengan menganalisa data tersebut atau menganalisa fenomena tersebut serta suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran atau suatu peristiwa pada masa sekarang. Dalam metode deskriptif dipelajari masalah -masalah yang berlaku dalam masyarakat termasuk tentang hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan, serta proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh pengaruh dari suatu fenomena. Dengan metode ini dapat diselidiki kedudukan status fenomena atau faktor dan melihat hubungan antara satu faktor dengan faktor yang lain. Selain itu juga menerangkan hubungan, menguji hipotesa-hipotesa, membuat prediksi serta mendapatkan makna dan implikasi dari suatu masalah yang ingin dipecahkan.[[48]](#footnote-49)**

Metode penelitian deskriptif analitis ini membantu penulis dalam memberikan ulasan mengenai kebijakan pertahanan Rusia dan dampaknya terhadap perimbangan militer dengan NATO serta memberikan gambaran tentang strategi Rusia dalam menangkal ancaman keamanan NATO.

1. **Teknik pengumpulan data**

Teknik pengumpulan data ialah langkah langkah yang dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Menurut Sugiyono mengatakan “Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu“.[[49]](#footnote-50) Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik studi kepustakaan atau literatur (*libabryresearch*)

Studi kepustakaan dilakukan melalui penelaahan data terhadap buku teks, jurnal ilmiah, dokumen, majalah berita, surat kabar, laporan lembaga pemerintah dan non-pemerintah, maupaun data-data yang terdapat website atau internet.Menurut Menurut Soerjono Soekanto “Studi keputakaan atau studi dokumen merupakan suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan mempergunakan ‘*content analysis*’.”[[50]](#footnote-51)

1. **Lokasi dan lama penelitian**
2. **Lokasi penelitian**
3. **Perpustakaan**

1. Perpustakaan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pasundan, Jl. Lengkong Dalam, No. 17, Bandung.
2. Perpustakaan Universitas Padjajaran, Jl. Imam Bonjol No. 21, Bandung.
3. Badan Perpustakaan dan Kerasipan Daerah Jawa Barat, Jl. Kawaluyaan Indah III, No. 4, Buah batu, Bandung.
4. **Instansi**
5. Kantor Kedutaan Besar Federasi Rusia, Jl. H. R. Rasuna Said Kav. X7 No. 1-2, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, (021) 5222912.
6. Pusat Kebudayaan Rusia, Jl. Diponegoro No. 12, Menteng, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, (021) 31935290.
7. Direktorat Keamanan Intenasional dan Perlucutan Senjata Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Jl. Taman Pejambon No. 6, Jakarta Pusat
8. **Lama penelitian**

Lama penelitian yang disediakan oleh peneliti untuk melewati proses tahapan-tahapan penelitian yaitu selama 6 (enam bulan) terhitung sejak Maret.

1. **Sistematika penulisan**

Dalam penulisan skripsi ini, penulis membagi tulisan dalam bab dengan sistematika sebagai berikut :

**BAB I PENDAHULUAN**

Dalam bab ini penulis menguraikan tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis, skema kerangka teoritis, hipotesis, operasionalisasi variabel dan indikator, tingkat analisis, metode penelitian dan teknik pengumpulan data, lokasi dan lama penelitian, dan sistematika penulisan.BAB I ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran awal mengenai penelitian hukum ini.

**BAB II OBJEK PENELITIAN VARIABEL BEBAS**

Dalam bab ini penulis menguraikan mengenai informasi umum/ dasar/ awal/ mengenai tema atau masalah yang dijadikan variabel bebas. Dalam bab ini penulis menjelaskan secara umum mengenai pengaruh upaya perluasan NATO di Eropa Timur melalui konflik Ukraina.

**BAB III OBJEK PENELITIAN VARIABEL TERIKAT**

Dalam bab ini penulis menguraikan mengenai informasi umum/ dasar/ awal/ mengenai tema atau masalah yang dijadikan variabel bebas. Dalam bab ini penulis menjelaskan secara umum mengenai kebijakan pertahanan Rusia.

**BAB IV VERIFIKASI DATA**

Dalam bab ini penulis menguraikan jawaban terhadap hipotesis dan indikator-indikator penelitian baik indikator variabel bebas maupun variabel terikat yang dideskripsikan dalam data fakta-fakta dan angka-angka. Adapun isi dari bab ini ialah pengaruh upaya perluasan NATO di Eropa Timur melalui konflik Ukraina terhadap kebijakan pertahanan Rusia.

**BAB V** **PENUTUP**

Dalam bab iniberisi kesimpulan dan saran mengenai penelitian ini. Kesimpulan merupakan hasil penelitian terutama dari pembahasan mengenai verifikasi data serta berisi jawaban dari identifikasi masalah yang diajukan, pada bagian akhir terdapat suatu penegasan bahwa hipotesis penelitian diterima atau tidak. Sedangkan saran merupakan sumbangan pemikiran penulis dalam upaya mengatasi permasalahan yang ada.

1. Angga Nurdin Rahmat, *Keamanan Global: Transformasi Isu Keamanan Pasca Perang Dingin* (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm. 1. [↑](#footnote-ref-2)
2. Sri Rahyuni, “Kebijakan Pertahanan Rusia dan Dampaknya Terhadap NATO”, Skripsi FISIP-HI Universitas Hasanuddin, 2012, hlm. 1. [↑](#footnote-ref-3)
3. Angga Nurdin Rahmat, Op.Cit, hlm. 8. [↑](#footnote-ref-4)
4. Amitav Acharya, *Regionalism and Multilateralism*: *Essay on Cooperative Security in Asia Pacific*  (Singapore: Eastern University Press, 2002), hlm.73. [↑](#footnote-ref-5)
5. Nana Supriatna, *Kapita Selekta Sejarah Amerika* (Bandung: UPI, 2008), hlm. 113. [↑](#footnote-ref-6)
6. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-7)
7. Vasili Christopher Andrew Mitrokhin, The *Sword and the Shield; The Mitrokhin Archive and The Secret History of the KGB* (New York: Basic Books, 2000), hlm. 276. [↑](#footnote-ref-8)
8. Nana Supriatna, *Op.Cit.,* hlm. 119. [↑](#footnote-ref-9)
9. David C. Isby and Charles Kamps Jr, *Armies of NATO’s Central Front* (London: Janes’s, 1985), hlm. 114-115. [↑](#footnote-ref-10)
10. http://www.nato.int/history/nato-history.html, diakses pada tanggal 17 Maret 2016. [↑](#footnote-ref-11)
11. http://www.saskschools.ca/curr\_content/history20/unit4/sec2\_03.html, diakses pada tanggal 17 Maret 2016. [↑](#footnote-ref-12)
12. <https://id.wikipedia.org/wiki/Eropa_Timur>, diakses pada tanggal 17 Maret 2016. [↑](#footnote-ref-13)
13. I Gede Wahyu Wicaksana, 2015. MBP Rusia, Eropa Timur, dan Asia Tengah SOH321 : Understanding Russia II : Russia’s Foreign Policy. Universitas Airlangga, FISIP Universitas Airlangga pada 10 April. [↑](#footnote-ref-14)
14. Charles W. Kegley, Jr. and Eugene R. Wittkopf, *World Politics, Trend and Transformation, sixth ed (* New York : St. Martin’s Press, 1997),hlm. 455*.* [↑](#footnote-ref-15)
15. Abdul Hadi Adnan, “*Dua Tahun Setelah Perluasan NATO 2004”, Jurnal Hubungan Internasional FISIP Universitas Pasundan,* hlm. 7 [↑](#footnote-ref-16)
16. <http://internasional.republika.co.id/berita/internasional/global/14/12/24/nh2kzl-ukraina-sedikit-lagi-jadi-anggota-nato>, Diakses pada tanggal 18 Maret 2016. [↑](#footnote-ref-17)
17. http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2014/03/140317\_crimea, Diakses pada tanggal 18 Maret 2016. [↑](#footnote-ref-18)
18. Jujun S. Suriasumantri, *Filsafat Ilmu : Sebuah Pengantar Populer* (Jakarta : Pustaka Sinar Rajawali, 1990), hlm. 128. [↑](#footnote-ref-19)
19. K. J. Holsti, *Politik Internasional : Suatu Kerangka Analisis* (terjemahan wawan juanda) (Bina Cipta, Bandung, 1992), hlm. 21-22. [↑](#footnote-ref-20)
20. <http://fisipunsil.blogspot.co.id/2010/04/pengertian-negara.html>, diakses pada tanggal 30 Maret 2016. [↑](#footnote-ref-21)
21. http://faisal94thobhone.wordpress.com/2013/09/26/pengertian-hubungan-internasional-menurut-para-ahli.html, diakses pada tanggal 30 Maret 2016. [↑](#footnote-ref-22)
22. <http://www.artikelsiana.com/2015/03/pengertian-politik-luar-negeri-tujuan.html>, diakses pada tanggal 30 Maret 2016 [↑](#footnote-ref-23)
23. Hyndman, James E., “National Interest and the New Look”, dalam *International Journal*, Vol.26, No.1 (1970/1971) , hlm. 5-18. [↑](#footnote-ref-24)
24. http//www.haryoprasodjo.com/2014/01/teori-konflik.html, diakses pada tanggal 28 Oktober 2015 [↑](#footnote-ref-25)
25. Wibawanto Nugroho, “Pertahanan Negara Dikaitkan dengan Kemampuan Negara. Verity”, dalam *Jurnal Hubungan Internasional Universitas Pelita Harapan Tanggerang*. No.1 (January-Juni 2009), hlm.70. [↑](#footnote-ref-26)
26. *Ibid,* hlm. 71. [↑](#footnote-ref-27)
27. Anak Agung Banyu Prawita, *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005), hlm. 121. [↑](#footnote-ref-28)
28. Mohtar Mas’oed, *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi* (Jakarta: Pustaka LP3ES, 2005) , hlm. 116. [↑](#footnote-ref-29)
29. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-30)
30. *Ibid* hlm. 163. [↑](#footnote-ref-31)
31. Anak Agung Banyu Prawita, *Op.Cit*. hlm. 40-41. [↑](#footnote-ref-32)
32. *Ibid*, *Op.Cit* hlm 42-43 [↑](#footnote-ref-33)
33. *Ibid*, *Op.Cit*. hlm 40-41 [↑](#footnote-ref-34)
34. Barry Buzan, *People, States, and Fear: An Agenda For International Security Studies in the Post Cold-War Era,* Edisi ke-II*, (*New York, Harvester Wheatsheaf, 1991*), hlm. 12.* [↑](#footnote-ref-35)
35. *Ibid*, hlm 4. [↑](#footnote-ref-36)
36. Richard Ullman, *Human Security and the Environment: International Comparison , (*Massachusetts, 1983), hlm. 133. [↑](#footnote-ref-37)
37. Gearoid O. Thuatail, Simon Dalby and Paul Routledge, *The Geopolitics Reader* (London, Routledge Taylor and Francis Group, 2003)*,* hlm.102-103. [↑](#footnote-ref-38)
38. Peter Hough, *Understanding Global Security* (Routledge Taylor and Francis Group, London, 2004)*,* hlm .15. [↑](#footnote-ref-39)
39. Paul R. Viotti dan Mark V. Kauppi, *International Relation Theory: Realism, Pluralism, Globalism, and Beyond* (Pearson Education, 1996),hlm .56. [↑](#footnote-ref-40)
40. James Rosenau, Kenneth W. Thompson and Gavin Boyd, *World Politics: An Introduction, Free Press (1976*), hlm 157. [↑](#footnote-ref-41)
41. Barry Buzan, *Op. Cit .* hlm 2-3. [↑](#footnote-ref-42)
42. *Ibid,* hlm. 61. [↑](#footnote-ref-43)
43. *Ibid,* hlm. 295. [↑](#footnote-ref-44)
44. *Ibid,* hlm 187 . [↑](#footnote-ref-45)
45. *Ibid,* hlm 112-114. [↑](#footnote-ref-46)
46. “Rusia Gelar Rudal Respons AS”, http://www.merdeka.com/politik/internasional/rusia-gelar-rudal-respon-as-mlhcmdg.html, diakses 30 Maret 2016. [↑](#footnote-ref-47)
47. Mochtar Mas’oed, *Op.Cit.*, hlm. 36-37. [↑](#footnote-ref-48)
48. Muhammad Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta, Ghalia Indonesia, 1988), hlm. 28 . [↑](#footnote-ref-49)
49. Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Cetakan ke- 19 (Bandung, Alfabeta, 2013), hlm. 2. [↑](#footnote-ref-50)
50. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 42. [↑](#footnote-ref-51)